

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN DESA DALAM  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR) PADA PERUSAHAAN SWASTA  
(STUDI KASUS PT. PMKS DI DESA TALIKUMAIN  
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU)**

**ROTANIUS**

**DOSEN PEMBIMBING: Hery Suryadi, S.Sos, M.Si**

**Kampus Universitas Riau Bina Widya JL. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru**

**Pekanbaru 28293**

**( 0761) 63277, 35675**

**Email : rota\_nius@ymail.com**

**085271277279**

**ABSTRAK**

In the era of regional autonomy, the role of Local Government and Rural highly charged. One of them is the implementation of the CSR program. In this case the Government has made regulations concerning on CSR one of Law No. 40 Year 2007 on limited liability. The purpose of this study was to determine the factors inhibiting the implementation of CSR and the Role of Local Governments know Rokan talikumain upstream and Village of the CSR programs that have been implemented by PT. POM (Palm Oil Mill) Talikumain.

This includes research into the types of qualitative research using the techniques of data collection with in-depth interviews to several informants who have been determined, as well as the analysis of qualitative data were analyzed descriptively. Necessary data are primary data and secondary data.

Based on the results of the study, in carrying out its role in CSR, Local Government and Rural carry out its role through several steps, among others, through komunikasi, resources, disposition and bureaucratic structures. Income before and after the introduction of the PT. POM Talikumain that implement CSR significantly different. To create and support the successful implementation of CSR programs, should be established pattern of relationships (relationship) between the parties involved are clear, it will improve the quality of CSR implementation koordinassi. Without a clear pattern of relationships among the various parties involved in the implementation of CSR, it is likely that the implementation of CSR programs will not run optimally. In addition, the government should fully support on the implementation of CSR programs, because with this CSR program has helped somewhat automated government in community development and empowerment.

*Keywords: Local Government, Rural, CSR*

## **ABSTRAK**

Pada era otonomi daerah ini, peran Pemerintah Daerah dan Desa sangat dituntut. Salah satu nya adalah dalam pelaksanaan program CSR. Dalam hal ini Pemerintah telah membuat peraturan yang menyangkut tentang CSR salah satunya Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan CSR dan mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hulu dan Desa talikumain terhadap Program-program CSR yang telah diimplementasikan PT. PMKS ( Pabrik Minyak Kelapa Sawit ) Talikumain.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang telah ditetapkan, serta analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan perannya dalam CSR, Pemerintah Daerah dan Desa melaksanakan perannya melalui beberapa langkah antara lain melalui komunikai, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya. Pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pabrik PT. PMKS Talikumain yang mengimplementasikan CSR berbeda nyata. Untuk menciptakan dan menunjang keberhasilan implementasi program CSR, harus ditetapkan pola hubungan (*relationship*) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas, hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Tanpa adanya pola hubungan yang jelas diantara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR, maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu Pemerintah harus mendukung penuh tentang pelaksanaan program-program CSR, karena dengan adanya program CSR ini otomatis telah membantu sedikit banyaknya pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

**Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Desa, CSR**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain menghasilkan maksimalisasi cara berpikir, industri juga mendatangkan keuntungan materiil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya. Tetapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa industri juga menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan, dan tentunya juga habitat manusia. Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi dan kerusakan fisik dan psikis bagi para pegawainya dan juga masyarakat sekitar.

Tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) yang sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) kini semakin diterima secara luas. Sebenarnya konsep ini kerap di dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para pebisnis maupun akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Pengertian CSR menurut World Business Council for Sustainable Development (dalam Suharto, 2009:101)

“Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.”

Pemerintah telah mengatur CSR yang harus dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia dalam UU no.40 tahun 2007 .

Munculnya Peranan Pemerintah Daerah terhadap program CSR setidaknya memunculkan 4 (empat) kemungkinan: pertama, ada kesan PEMDA berupaya membagi beban tanggungjawab pembangunan kepada perusahaan. kedua, ada upaya meraup dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ketiga. Ketiga, PEMDA berupaya mengelola program CSR satu atap di koordinir oleh PEMDA, walaupun belum jelas pola dan tata laksanaanya. Keempat, pihak perusahaan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan program CSR.

Dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah sekaligus peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rokan Hulu berupaya mengundang investor untuk mengolah potensi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat digunakan para investor. Salah satu investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rokan Hulu adalah PT. PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Talikumain yang bergerak dalam pengembangan agroindustri berupa pabrik pengolahan kelapa sawit. Kehadiran aktivitas agroindustri ini diharapkan antara lain membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan *multiplier effect*. Meningkatnya *multiplier effect* terjadi dengan munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian baru bagi masyarakat sekitarnya.

Harapan terjadinya peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebagai akibat kehadiran aktivitas perekonomian ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu sejauh mana kesempatan yang diberikan perusahaan tersebut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan sejauh mana kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian baru tersebut. Selain perubahan pendapatan, kehadiran PT PMKS diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Perubahan lahan yang sebelumnya sebagai kawasan

pertaniandan hutan menjadi kawasan industri yang akan mempengaruhi jenis sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat.

Pengaruh adanya industri dapat dilihat dari terjadinya perubahan yang bersifat fisik berupa dibangunnya jalan dan infrastruktur untuk memudahkan transportasi pengangkutan bahan baku maupun pengangkutan hasil industri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi industri tersebut kepada masyarakat pedesaan disekitar industri. Laba industri selain di potong pajak dan retribusi kepada pemerintahan (daerah) juga dapatberpartisipasi kepada pembangunan desa setempat.

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kebijaksanaan Tata Ruang Daerah menyangkut daerah perkotaan dan perdesaan yang salah satu isinya: daerah perdesaan pengembangannya diarahkan sebagai pusat produksi, penyediaan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri dan daerah penyangga lingkungan hidup. Dengan demikian perlu pengendalian penggunaan tanah pertanian subur dengan kepentingan non pertanian, termasuk penyelamatan, pelestarian dan peningkatan kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.

## **B. Kerangka Teoritis**

Dalam membahas suatu permasalahan perlu dikemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan mampu menjadi hipotesa yang akurat. Teori merupakan serangkaian konsep serta definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberpa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah *implementation problems approach*(pendekatan masalah implementasi) yang dikemukakan oleh **Edward III (2008 : 149-154)**. Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan 2 pertanyaan pokok , yakni : 1) faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ? dan 2) faktor apa saja yang menghambat keberhasilan implementai kebijakan ?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, siakp birokrasi atau pelaksan, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat criteria tersebut menjadi criteria penting dalm implementasi suatu kebijakan.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, lokasi penelitian ada dua tempat di aparaturn pemerintah sebagai pemegang peran kebijakan dan PT PMKS ( Pabrik Minyak Kelapa Sawit ) Talikumain di Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”merupakan pelaksana Corporate Social Responsibility.

### **3. Informan**

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur – unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar – benar memahami tentang masalah pelaksana Corporate Social Responsibility di PT PMKS Talikumain.

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Komisi B DPRD kabupaten rokan Hulu	1
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu	1
3	Camat Tambusai	1
4	Dewan komisaris PT PMKS Talikumain	1
5	Kepala Desa Talikumain	1
6	Ketua RT Se- Desa Talikumain	12
	Jumlah	17

**Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2012**

#### 4. Data Yang Diperlukan

Data primer : Data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini dan hambatan – hambatan atau kendala yang ditemukan dan merealisasikannya.

Data sekunder : Data yang diperoleh dari keterangan sumber – sumber lainya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa :

- Keadaan geografis dan demografis Kabupaten Rokan Hulu
- Arsip, Data, Laporan, Buku peraturan Perundang – undangan, dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan didalam bahan yang membentuk dokumentasi (**Moleong, 2005 : 217**). Penulis mengumpulkan dokumen – dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang tentang peran pemerintah dalam CSR di daerah tersebut. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk laporan, arsip, dan data yang diperoleh dari berbagai sumber.
2. Studi lapangan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data primer dengan cara : WawancaraPeneliti mengadakan tanya jawab dengan informan guna memperoleh data mengenai peran pemerintah Kabupaten Rokan hulu dalam implementasi Corporate Social Responsibility yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk paparan gambaran dari temuan – temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi, dan sebagainya akan disusun dan di sajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

## **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 142 Desa, luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu  $\pm 7.449,85 \text{ Km}^2$ , dengan jumlah penduduk 385.425 orang terdiri dari 195.695 penduduk laki-laki ( 50,77 % ) dan 189.730 penduduk perempuan ( 49,23 % ). Kabupaten Rokan Hulu terletak di antara  $100^\circ\text{-}101^\circ 52'$  Bujur Timur dan  $0^\circ\text{-}1^\circ 30'$  Lintang Utara.

Kecamatan Tambusai merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, berperan juga sebagai penyangga jasa dan perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Luas wilayah Kecamatan Tambusai adalah  $\pm 1.127,50 \text{ km}^2$  atau 112.750 Ha yang terdiri dari 12 Desa.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Tambusai adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Sosah Kabupaten Padang Lawas Prop. Sumatera Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam CSR pada PT. PMKS Talikumain**

Dalam pembuatan suatu keputusan atau suatu kebijakan peran pemerintah sangat diperlukan disini. Dalam rangka menghindari konflik-konflik yang akan terjadi diperlukan langkah-langkah strategis. Untuk mempermudah penulis dalam melihat peran pemerintah daerah dan desa dalam program CSR pada perusahaan swasta, maka penulis akan menggunakan perspektif atau pendekatan sebagai acuan penulis dalam melihat peran Pemerintah Daerah dan Desa terhadap CSR pada perusahaan swasta.

Peran yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu dalam rangka menyikapi program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta dalam hal ini yaitu PT. PMKS Talikumain pada dasarnya meliputi beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

- Peran regulasi maksudnya disini adalah bagaimana Pemerintah Daerah membuat suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program CSR yang di implementasikan oleh PT. PMKS Talikumain
- Peran fasilitasi yaitu meningkatkan peran Pemerintah dalam pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

- Peran koordinasi yaitu di mana pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu PT. PMKS Talikumain tentang prosedur dalam pelaksanaan program-program CSR tersebut.

Terlepas dari itu peran pemerintah sangat berpengaruh terutama dalam implementasi suatu kebijakan tentang CSR. Di sini penulis menggunakan pendekatan **Edward III (1984 : 9-10)** mengemukakan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yaitu :

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu : *communication*, *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif, *ketiga Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapaan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan, *keempat beureucratic structures*. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Dengan pendekatan masalah implementasi yang dikemukakan oleh **Edward III** maka penulis menganalisis empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan yang akan dilakukan dalam program CSR terhadap perusahaan swasta yakni PT. PMKS Talikumain sebagai berikut :

1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan,
2. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staff yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fasilitasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana komitmen pelaksana terhadap suatu program.

Penempatan pelaku dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam program CSR harus sesuai dengan keahliannya yang dapat membantu agar kesalahan tidak sampai terjadi. Hendaknya para aparatur atau para pelaku yang telah ditunjuk harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan bidangnya agar sasaran yang dapat tercapai. Tetapi pada kenyataannya belum terlaksana dengan optimal.

4. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedur* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Struktur pemerintahan desa telah didasarkan kepada *standard operating procedur* (pengaturan standar pelaksanaan), namun dalam pelaksanaan program CSR pemerintah belum menyusun struktur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **B. FAKTOR FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM CSR YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH PT.PMKS TALIKUMAIN**

Secara umum program CSR sangatlah banyak manfaatnya baik itu bagi pemerintah, masyarakat mauupu oleh perusahaan itu sendiri. Walaupun demikian ada saja yang menghambat proses tersebut, ini dikarenakan oleh beberap faktor, faktor-faktor yang menghambat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Faktor koordinasi. Kurangnya kesadaran dan keseriusan koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam program-program CSR. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Rokan Hulu pada tanggal 18 januari 2013 :  
*“Hambatan yang terjadi dalam koordinasi terhadap program-program CSR ini dikarenakan kurang kesadaran akan tanggung jawab yang telah dembankan kepada yang bersangkutan ditambah lagi dengan tidak seriusnya”*
- 2 Faktor sumber daya politik. Hal ini dikarenakn karena kurangnya lobi atau ajakan kepad seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program-program CSR, sehingga peran serta dari masing-masing tidak terealisasi dengan baik.
- 3 Faktor dalam masyarakat. Maksudnya disini adalah kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program-program CSR yang diimplementasikan oleh PT. PMKS Talikumain yang akhirnya akan menguntungkan pembangunan pada Desa tu sendiri.
- 4 Rendahnya pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan peranan penting dalam mewujudkan salah satu program pemerintah, misalnya dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat benar-benar mengetahui akan arti pentingnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab yang sebelumnya, dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang menyangkut tentang peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam CSR pada perusahaan swasta yakni PT. PMKS Talikumain antara lain sebagai berikut :

- 1 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai center dari para pelaku yang terlibat dalam CSR. Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang mendorong berhasilnya pelaksanaan tugas dalam proses program CSR didukung juga dengan peran penting dari masyarakat terutama dari pihak perusahaan.
- 2 Kehadiran PT. PMKS Talikumain sebelum dan setelah pelaksanaan program CSR telah banyak meningkatkan ekonomi rakyat dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, seperti di bangunnya jalan untuk mempermudah masyarakat membawa hasil pertaniannya, dibangunnya rumah sehat, pemberian beasiswa, dan masih banyak yang lainnya.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas penulis memberikan beberapa saran yang dapat yang dapat membangun antara lain sebagai berikut :

- 1 Untuk menciptakan dan menunjang keberhasilan implementasi program CSR, harus



ditetapkan pola hubungan (*relationship*) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas, hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Tanpa adanya pola hubungan yang jelas diantara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR, maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tidak akan berjalan secara optimal.

- 2 Pemerintah harus mendukung penuh tentang pelaksanaan program-program CSR, karena dengan adanya program CSR ini otomatis telah membantu sedikit banyaknya pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, meningkatkan efisiensi dan terciptanya kesinambungan pelaksanaan program CSR perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap program agar pencapaian sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budimanta, Arif, et.al., 2008, *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD.
- Supriatna, 2002 , *Dimensi Corporate Social Responsibility Dalam paradigm Perubahan*. Fascho Publishing, Gresik
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.